

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, dkk. 2000. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Edisi Revisi. YKPN. Yogyakarta
- Arja Sadjarto. 2000. Akuntabilitas Dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, Vol 2 No 2. Hal 138-150.
- Deddi Nordiawan. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 1. Salemba Empat. Jakarta.
- Edy Sukarno. 2002. *Sistem Pengendalian Manajemen Suatu Pendekatan Praktis*. Edisi Revisi. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Ehrmann Suhartono & Mochammad Solichin. 2006. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran Instansi Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi. *Simposium Nasional Akuntansi IX*. Padang.
- Emile Setia Darma. 2004. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pengendalian Akuntansi Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Pemerintah Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi VII*. Bali.
- Ilham Primadona. 2010. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Kinerja Manajerial Sebagai Variabel Moderasi, *Skripsi*. Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah. Yogyakarta
- Indra Bastian. 2005. *Akuntansi sektor publik suatu pengantar*. Edisi 1. Erlangga. Jakarta.
- Indraswari Kusumanigrum. 2010. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, *Tesis*. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Semarang.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 1. Andi. Yogyakarta.
- Netty Herawaty. 2011. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah Daerah Kota Jambi. *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*, Vol 13 No 2. Hal 31-36.

Presiden Republik Indonesia. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999. Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Republik Indonesia. Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1999. Tentang Pemerintah Daerah.

Republik Indonesia. Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1999. Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Republik Indonesia. Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintah Daerah

Republik Indonesia. Undang-Undang RI No. 33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Restie Ningsaptitinim. 2010. Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Mekanisme Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba, *skripsi*. Program Sarjana Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang.

Robert N. Anthony & Vijay Govindarajan. 1998. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Edisi 9. Salemba Empat. Jakarta.

Robert N. Anthony & Vijay Govindarajan. 2005. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Edisi 11. Salemba Empat. Jakarta.

Sukma Lesmana. 2002. Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan Yang Dipersepsikan Dan Strategi Kompetitif Terhadap Hubungan Sistem Kontrol Dengan Kinerja Perusahaan, *Tesis*. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Semarang.

Suliyanto. 2006. *Metode Riset Bisnis*. Andi. Yogyakarta.

Suardjono. 2005. *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Edisi 3. BPFE. Yogyakarta.

Trihendradi. 2012. *SPSS 20 Analisis Data Statistik*. Edisi 1. Andi. Yogyakarta.

Urip Santoso & Yohanes Joni Panbelum. 2008. Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud. *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol 4 No 1. Hal 14-33.

Zakaria. 2009. Pengaruh Sistem Pelaporan, Konflik Peran, Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Efektivitas dan Efisiensi Sistem Pengendalian Manajemen Pada Fakultas di USU, *Tesis*. Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. Medan.